



Cerdas si



# RESPON KETUM PERSIPAL SOAL DUKUNGAN DANA BANK SULTENG

BACA HALAMAN 02

PROYEK RP10 M  
BERMASALAH,  
JAKSA TAHAN  
KONTRAKTORNYA  
BACA HAL 03



INI KOMENTAR  
MANTAN REKTOR  
UNTAD SETELAH  
BEBAS DARI HUKUMAN  
BACA HAL 05



# Respon Ketum Persipal Soal Dukungan Dana Bank Sulteng

Palu, Metrosulawesi – Ketua Umum Persipal FC, Rusdy Mastura, angkat bicara menanggapi isu yang beredar terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Sulteng yang disebut-sebut banyak mengalir ke klub berjuduk Laskar Tadulako tersebut dalam perjalanan mereka di kompetisi Liga 2 musim 2024.

Dalam informasi yang beredar, tercatat dana sebesar Rp11,7 miliar telah digelontorkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah kepada Persipal FC. Dana ini digunakan untuk menunjang operasional klub, termasuk membayar gaji pemain hingga berbagai kebutuhan teknis lainnya sepanjang musim kompetisi.

Menurut Rusdy Mastura – yang akrab disapa Cudy – dukungan dari BPD sangat krusial dalam pengembangan klub sepak bola profesional di daerah. Ia menegaskan bahwa hampir seluruh klub di Indonesia, dari Papua hingga Jawa, turut bergantung pada sokongan finansial dari bank daerah.

“Setiap klub yang berlaga di Liga 2 membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar per musim. Bank-bank daerah di berbagai provinsi seperti Papua, Jawa Barat, Kalimantan, hingga Sumatera Selatan, juga menjadi sponsor utama klub-klub sepak bola. Kalau tidak seperti itu, sepak bola kita tidak akan maju,” tegas Cudy, Selasa (14/5).

Ia menjelaskan, sepanjang musim lalu Persipal FC menjalani total 22 pertandingan, dengan 11 laga diantaranya merupakan laga tandang yang tentunya membutuhkan pembiayaan besar. Belum lagi, untuk keperluan pemusatan latihan (training center), klub membutuhkan biaya operasional harian yang mencapai Rp9-10 juta per hari.



Ketua umum Persipal, Rusdy Mastura. (FOTO: IST)

Cudy juga menekankan bahwa Persipal FC bukan sekadar klub sepak bola, melainkan bagian penting dari identitas dan kebanggaan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Persipal adalah tim kebanggaan

rakyat Sulteng. Klub ini memiliki sejarah sosial yang erat dengan masyarakat Kaili, khususnya dalam dunia sepak bola. Sudah seharusnya kita semua mendukung eksistensi dan kemajuan Persipal,” tutupnya. (ap)



Tersangka dugaan korupsi proyek rabat beton, Cristian Hadi Candra digiring ke mobil tahanan Kejari Donggala, Rabu 14 Mei 2025. FOTO: TAMSİYIR



Kepala Kejaksaan Negeri Donggala Moh Fahri (baju coklat) memberikan keterangan kepada wartawan. FOTO TAMSİYIR:

## Proyek Rp10 M Bermasalah, Jaksa Tahan Kontraktornya

**Donggala, Metrosulawesi-** Kejari Donggala akhirnya menahan kontraktor proyek rabat beton dengan pagu anggaran sebesar Rp10 miliar, Cristian Hadi Candra, Rabu 14 Mei 2025.

"Kami menahan penyedia. Proyek ini tahun 2024 dengan anggaran Rp9 miliar lebih (setelah potong pajak) peningkatan jalan rabat beton desa Mbulawa Kecamatan Rio Pakava," kata kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Donggala, Moh Fahri, Rabu 14 Mei 2025.

"Ada menjadi fokus pemeriksaan timbunan dan beton, timbunan volume tidak cukup," tambahnya lagi.

Fahri menjelaskan kontraktor pelaksana, Cristian Hadi Candra sudah mendapat teguran dari pengawas untuk tidak melanjutkan pekerjaan sebelum memperbaiki timbunan. Namun itu,

tidak diikuti oleh kontraktor, sehingga di lokasi proyek terjadi perkelahian.

"Konsultan pengawas sudah larang jangan dulu lanjut cukupkan dulu volume timbunan. Sempat adu fisik di lapangan, tetapi permintaan pengawas tidak diikuti oleh kontraktor," ujarnya.

Fahri mengaku sempat turun melihat kondisi proyek tersebut. "Secara fisik beton tidak rata. Saya turun di lapangan sebanyak dua kali bersama ahli. Jalan rabat beton sepanjang 3.000 meter itu, hanya 700 lebih yang terealisasi. Rabat beton juga bermasalah, timbunan pilihan ketebalan juga bermasalah," jelas Kajari.

Dikatakannya lagi, Kejari Donggala sudah melakukan gelar perkara, dan semua pihak dalam kasus tersebut sudah dimintai keterangan.

"Kami menggunakan saksi ahli bidang

konstruksi, dan ahli yang menghitung kerugian negara jadi bersabar karena masih proses perhitungan. Uang muka yang sudah dicairkan itu Rp2 miliar lebih," tutupnya.

Amatan Metrosulawesi, setelah menjalani pemeriksaan, tersangka Cristian Hadi Candra langsung dibawa ke mobil tahanan Kejari Donggala untuk dititipkan di rumah tahanan Maesa Palu.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebelum ditahan, tersangka Cristian sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejari Donggala. Saat itu status Cristian masih sebatas saksi.

Kejari Donggala kemudian menaikkan status Cristian menjadi tersangka setelah gelar perkara dan memperoleh dua alat bukti yang cukup. <sup>(anc)</sup>

# Bank Sulteng mobile



- ✓ PRAKTIS
- ✓ MUDAH
- ✓ EFISIEN

## Download Sekarang



Segera Kunjungi Bank Sulteng terdekat

## Dapat Pengurangan Hukuman dari Mahkamah Agung

# Ini Komentar Mantan Rektor Untad Basir Cyio

**Palu, Metrosulawesi-** Putusan kasasi Mahkamah Agung menjadi penolong mantan Rektor Universitas Tadulako (Untad), Moh Basir Cyio bebas dari pidana lebih cepat. Putusan kasasi itu mengubah putusannya dari empat tahun menjadi satu tahun lima bulan.

“Saya sangat bersyukur bahwa Allah telah mengabulkan doa saya. Setiap saat saya berdoa genapkan putusan saya menjadi lima tahun, jika itu memenuhi rasa keadilan. Tapi jika tidak ya Allah, mohon putusan yang seadil-adilnya,” kata Basir saat ditemui, Rabu 14 Mei 2025.

Mantan Rektor Untad dua periode itu pun bercerita soal kasus hukum yang dialaminya. Dia mengaku pasrah saja ketika Pengadilan Tinggi Sulteng memperberat hukumannya dari satu tahun menjadi empat tahun, ditambah harus membayar uang pengganti sebesar satu miliar lebih.

Putusan banding itu pun ternyata tidak membuat Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Palu puas, dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Di Mahkamah Agung (MA), ternyata berbalik. Majelis Hakim MA yang diketuai Soesilo, didampingi dua hakim anggota Ansori dan Ainal Mardhiah mengubah besaran hukuman dari empat tahun menjadi satu tahun lima bulan.

Majelis hakim MA juga menghapus hukuman membayar uang pengganti yang besarnya satu miliar lebih. Hakim MA hanya membebani membayar denda sebesar Rp50 juta.

“Ini sudah jalan-jalan Allah yang diberikan kepada saya. Saya mengambil banyak hikmah dari apa yang saya alami ini,” kata Basir.

### MENCEDERAI RASA KEADILAN

Dikutip dari putusan Mahkamah Agung, majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa alasan kasasi yang diajukan JPU yang menilai *judex facti* tingkat banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, ditolak oleh majelis hakim MA. Alasan kasasi tersebut tidak dapat



**Moh. Basir Cyio.** FOTO: DOK

dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa Basir sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya.

Fakta-fakta di persidangan terungkap, bahwa terdakwa selaku Penanggungjawab dan Taqyuddin Bakri selaku Koordinator unit Pusat Kerjasama Publikasi Internasional (International Publication Collaborative Center/ IPCC) Universitas Tadulako tahun 2019, 2020 dan 2021 melakukan Pengelolaan Keuangan IPCC Universitas Tadulako tahun 2019, 2020 dan 2021.

MA berpendapat terdakwa telah lalai mengawasi dan mengontrol seluruh penyelenggaraan program kegiatan yang dilakukan oleh Taqyuddin Bakri selaku Koordinator IPCC yang bersifat manajemen administrasi maupun dalam pengelolaan keuangan termasuk dalam hal permintaan dana ke Rektorat berikut pertanggungjawabannya.

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengawasi pengelolaan keuangan dan administrasi di IPCC Universitas Tadulako mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp4,7 miliar lebih.

Hakim MA berpendapat Terdakwa telah lalai mengawasi dan mengontrol

seluruh penyelenggaraan program kegiatan yang dilakukan oleh Taqyuddin Bakri, selaku Koordinator IPCC. Perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain namun mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam putusan kasasi itu disebutkan, *judex juris* (MA) mempertimbangkan dengan seksama mengenai relevansi antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan kesalahan Terdakwa, maka pidana tersebut terlalu berat dan tidak proporsional, sehingga mencederai rasa keadilan.

Demikian pula apabila dikaitkan dengan pidana tambahan uang pengganti, yang mana Terdakwa tidak memperoleh keuntungan yang dinikmati dari hasil korupsi. Maka tidak cukup alasan menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak menerima aliran keuangan hasil korupsi yang dilakukan oleh Taqyuddin Bakri.

MA berpendapat, tanggungjawab Terdakwa lebih kepada peran Terdakwa sebagai Penanggung Jawab IPCC yang memiliki tugas terkait teknis publikasi dan pengelolaan IPCC, dan tidak spesifik berkaitan dengan pengelolaan anggaran secara langsung.

Terdakwa sebenarnya hanya bertanggungjawab secara moral karena kelalaiannya tidak mengawasi pengelolaan keuangan dan administrasi yang disalahgunakan oleh Taqyuddin Bakri, yang berujung pada kerugian Negara. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu berat sehingga *judex juris* perlu memperbaiki perpidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Hakim MA menyebutkan, terdakwa tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka barang bukti yang disita dari Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis dikembalikan kepada Terdakwa. <sup>(dim)</sup>



Gubernur Anwar Hafid bersama General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo Atmoko Basuki dan jajaran di kediaman pribadinya, Selasa (13/5/2025). FOTO BIRO ADPIM PEMPROV

## Gubernur: 87 Desa Belum Ada Listrik Jadi Prioritas

**Palu, Metrosulawesi-** Pemerintah Provinsi Sulteng memprioritaskan elektrifikasi di 87 desa yang belum ada listrik. Hal ini termasuk salah satu dari 9 program Berani, yakni Berani Menyala.

Gubernur Anwar Hafid mengatakan itu, menerima audiensi General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Suluttenggo Atmoko Basuki dan jajaran di kediaman pribadinya, Selasa (13/5/2025).

Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov Sulteng telah melakukan efisiensi anggaran dalam APBD T.A 2025, yang sebagian besar diarahkan untuk mendukung Program 9 Berani, termasuk Berani Menyala.

Program ini juga mencakup bantuan pemasangan kilometer listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu. "Saat ini masih ada 87 desa yang belum teraliri listrik oleh PLN. Ini menjadi prioritas kami," kata Gubernur.

Sebelumnya GM PT PLN UID Suluttenggo Atmoko Basuki melaporkan gangguan listrik yang sempat melanda Kota Palu dan sejumlah wilayah lainnya pada tanggal 11 Mei 2025 berhasil dipulihkan dalam waktu dua jam berkat

respons cepat tim teknis PLN.

"Pasokan listrik sempat terhenti, namun berkat best effort seluruh unit, pemulihan bisa dilakukan secara bertahap dan cepat," ujar Atmoko.

Gubernur Anwar Hafid mengapresiasi langkah cepat PLN dalam menangani gangguan tersebut. Ia pun menegaskan bahwa ketersediaan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus selalu dijaga.

"Terima kasih atas kerja cepat dan kolaboratif PLN," ujarnya.

Dalam dialog tersebut, Gubernur juga menanyakan rencana kerja PLN terkait penguatan jaringan listrik di Sulawesi Tengah. Menanggapi hal itu, GM PLN mengungkapkan bahwa proyek transmisi 150 kV di Kabupaten Morowali dijadwalkan rampung pada Agustus atau September 2025.

Ia juga mengusulkan dukungan pemerintah provinsi dalam perpanjangan kontrak pasokan listrik dengan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), yang selama ini menyuplai sekitar 15 megawatt listrik untuk kebutuhan PLN.

"Kami berharap dukungan

gubernur agar kerjasama ini bisa dilanjutkan," ujarnya.

Gubernur Anwar Hafid menyatakan kesiapannya mendukung langkah tersebut. Ia pun menilai suplai energi yang cukup sangat penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam audiensi tersebut, General Manager (GM) PT PLN UID juga melaporkan kemajuan kegiatan PLN sebagai bagian dari sinergi Program BERANI Menyala, yang bertujuan menyediakan akses listrik bagi desa-desa terpencil dan masyarakat kurang mampu. Salah satu titik fokus utama dari kegiatan ini adalah Desa Olu, Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi.

Menurutnya, sebanyak 300 calon pelanggan telah terdata di desa tersebut. Ia pun mengajak gubernur untuk turun langsung kelapangan meninjau kesiapan program.

Gubernur juga menyatakan rencananya untuk hadir langsung melaunching Program BERANI Menyala di Desa Olu.

"Kita tidak hanya menyalakan listrik, tetapi juga menyalakan harapan dan mimpi masyarakat," katanya. <sup>(ml/)</sup>



Atlet Pergatsi Sulawesi Tengah berswafoto sebelum keberangkatan di Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (14/5/2025). (FOTO: ADI PRANATA).

## Kejurnas Gateball 2025

# PERGATSI Sulteng Kirim 25 Atlet

Palu, Metrosulawesi – Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Sulawesi Tengah resmi mengirimkan 25 atlet untuk berlaga di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Gateball 2025 yang akan digelar pada 15–21 Mei 2025 di Bogor, Jawa Barat.

Kontingen Sulteng akan tampil pada seluruh 11 kategori pertandingan yang dipertandingkan dalam ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Keikutsertaan penuh ini menunjukkan

keseriusan dan kesiapan PERGATSI Sulteng dalam mempertahankan prestasi mereka di kancah nasional.

Delegasi ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I PERGATSI Sulteng yang juga menjabat sebagai Kepala Pelatih, Asbudianto. Ia akan didampingi oleh Manajer Tim Dharmawangsa serta dua asisten pelatih.

Di mana keberangkatan ada dua kloter. Yang pertama pada Rabu (14/5) kemarin dan Kamis (15/5) hari ini.

“Kami menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum yang telah kami raih pada Kejurnas sebelumnya dan PON Aceh–Sumut 2024,” ujar Dharmawangsa.

Dengan komposisi atlet dan pelatih yang solid, serta persiapan matang yang telah dilakukan, PERGATSI Sulteng optimis mampu tampil maksimal dan kembali membawa pulang prestasi terbaik untuk daerah. (ap)



Skuad Celebest Fc Liga 4 nasional. (Foto: dok Celebest Fc).

## Tanduk Anoa Diujung Tanduk Jalani Laga Krusial Hari Ini

**Palu, Metrosulawesi**-Peluang Celebest FC untuk melaju ke babak delapan besar Liga 4 Nasional musim 2024/2025 kini berada di ujung tanduk. Tim berjudul Tanduk Anoa itu wajib meraih kemenangan dalam laga terakhir Grup C babak 16 besar jika ingin menjaga asa lolos ke fase selanjutnya.

Celebest FC akan menghadapi Persinga Ngawi pada Kamis (14/5) siang ini, dalam pertandingan krusial yang menentukan nasib mereka. Kekalahan dalam laga ini otomatis menggugurkan harapan tim asuhan Lukman Masiara untuk promosi ke

kasta berikutnya.

Hingga saat ini, Celebest FC berada di peringkat ketiga klasemen Grup C dengan koleksi satu poin dari dua laga. Posisi kedua dihuni Sang Maestro dengan dua poin, sementara Tribrata Rafflesia telah memastikan diri lolos sebagai juara grup.

Meski meraih kemenangan atas Persinga Ngawi, peluang Celebest FC tetap bergantung pada hasil pertandingan antara Sang Maestro melawan Tribrata Rafflesia. Jika Sang Maestro juga meraih kemenangan, maka Celebest tetap tersingkir meski

berhasil menang.

Namun, jika Celebest FC imbang dan Sang Maestro kalah, maka penentuan tim pendamping Tribrata menuju delapan besar akan ditentukan melalui selisih gol head-to-head antara ketiga tim: Celebest FC, Persinga Ngawi, dan Sang Maestro, sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan kondisi tersebut, Celebest FC harus tampil habis-habisan demi meraih tiga poin sembari berharap Tribrata Rafflesia bermain sportif dan tidak memberi celah pada Sang Maestro. <sup>(AP)</sup>



Pelantikan ketua KONI Donggala Asgaf Umar Rabu kemarin di ruang Kasiromu kantor Bupati Donggala, Rabu 14 Mei 2025. FOTO TAMSIR

## Asgaf Umar Resmi Memimpin KONI Donggala

**Donggala, Metrosulawesi-** Asgaf Umar resmi memimpin KONI Donggala periode 2025-2029. Mantan anggota Dewan Donggala itu dikukuhkan oleh ketua KONI Propinsi Nizar Rahmatu di ruang Kasiromu kantor Bupati Donggala Rabu 14 Mei 2025.

Proses pengukuhan atau pantikan ketua KONI tersebut juga dihadiri wakil ketua MPR RI Abcandra, sehingga ruangan pelantikan itu menjadi ajang saling puji sesama pejabat.

"Sejarah di kabupaten Donggala, proses pelantikan KONI dihadiri senator wakil ketua MPR RI Abcandra, senator muda anak daerah, beliau ini (Abcandra) pernah membantu saya sewaktu menjadi anggota DPRD Donggala," kata ketua KONI Donggala Asgaf Umar saat menyampaikan sambutan lepasnya.

"Semoga dengan kehadiran wakil ketua MPR RI ini bisa memberikan sumbangsi bagi kemajuan olahraga di kabupaten Donggala. Apalagi Donggala ibu kandung yang mati melahirkan tak

terkecuali di bidang olahraga. Contoh anaknya, Parimo (Kabupaten Parigi Moutong) sekarang sudah maju sudah punya gedung olahraga, kita di Donggala belum punya GOR," sebutnya lagi.

Ketua KONI Sulteng. Nizar Rahmatu dalam sambutannya memuji kepemimpinan Bupati Donggala Vera Elena Laruni yang menurutnya olahraga akan maju di kabupaten Donggala.

"Atlet kita cukup luar biasa, dan kebanyakan dari Kabupaten Donggala, muda-mudahan sebagai bupati perempuan pertama di Donggala, ibu Vera memperhatikan olahraga," sebutnya.

Sementara itu Bupati Donggala Vera Elena Laruni juga memuji ketua KONI Nizar Rahmatu dan wakil ketua MPR RI Abcandra. Menurutnya dua pejabat tersebut potensial.

"Pak Nizar ini senior saya abang saya, tokoh olahraga di Provinsi Sulawesi Tengah. Hanya belum terpilih menjadi bupati Parimo, insya Allah nanti dua kali

maju seperti saya baru bisa jadi bupati," ucap Vera.

"Kebanggaan juga wakil ketua MPR RI bisa hadir di Donggala. Jadi kita bisa dibantu wakil ketua MPR di Kementerian teknis," tuturnya.

Tidak mau kalah, Wakil ketua MPR Abcandra pun balik memuji sesama pejabat. Menurutnya sejarah pertama bupati perempuan di Donggala, semoga putri-putri terbaik di Donggala bisa mengikut jejaknya.

"Saya siap vasilitasi ibu Vera bertemu pejabat kementerian teknis di Jakarta. Bupati perempuan pertama di Donggala, semoga putri-putri terbaik di Donggala bisa mengikuti jejaknya.

Patut di tunggu apakah Dengan dilantiknya kepengurusan KONI yang baru periode 2025-2029 tantangan pertama yang harus dijawab, akankah kabupaten Donggala berprestasi di ajang Porpop di Kabupaten Morowali pada tahun 2026 mendatang, patut ditunggu. (anc)

# IMIP

INDONESIA  
MOROWALI  
INDUSTRIAL PARK

#TogetherWeCan!





Suasana sidang lanjutan perkara kasus pembuatan dan peredaran uang palsu dengan 14 terdakwa di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IIB Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (14/5/2025). ANTARA/DARWIN FATIR.

## 14 Terdakwa Uang Palsu Jalani Sidang di PN Gowa

**Makassar, Metrosulawesi-**Sebanyak 14 orang terdakwa kasus pembuatan dan peredaran uang palsu menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Kelas IIB, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

"Agenda sidang hari ini ada 11 perkara yang disidangkan untuk 14 orang terdakwa. 14 terdakwa ini menjalani agenda sidang berbeda-beda," kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Gowa, Basri Baco di Gowa, Rabu.

Ia menjelaskan agenda sidang bervariasi, mulai dari sidang pembacaan dakwaan ada empat berkas perkara, selanjutnya agenda pembuktian, pemeriksaan saksi ada tiga berkas perkara dan sidang eksepsi ada empat perkara.

Untuk terdakwa Andi Ibrahim, Ambo Ala, dan Mubin Nasir, kata dia, menjalani agenda sidang pemeriksaan saksi. Sedangkan, terdakwa John Biliater, Andi Haeruddin, Sukmawati dan Satariah dengan agenda eksepsi.

Selain itu, JPU juga membacakan tanggapan eksepsi dari terdakwa

Muhammad Syahrana. Sementara enam terdakwa lainnya, masing-masing Kamarang, Irfandy, Satriyadi Ilham, Muhammad Manggabarani dan Sri Wahyudi menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan.

"Hari ini, kami ada tiga berkas perkara untuk agenda saksi. Satu tadi, seperti yang dilihat untuk terdakwa Andi Ibrahim, saksinya Mubin. Nanti Mubin dan Amboala untuk terdakwa Andi Ibrahim. Untuk terdakwa Mubin, nanti ada satu dari pihak kepolisian, Adrianto," ujarnya.

Sementara untuk terdakwa Ambo Ala, nantinya JPU akan menghadirkan saksi Mubin Nasir. Sehingga untuk sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dihadirkan tiga terdakwa yakni Andi Ibrahim, Ambo Ala, dan Mubin berkaitan produksi upal di Kampus UIN Alauddin Samata Gowa.

Terkait dengan eksepsi (nota keberatan) terdakwa Jhon Biliater, kata Basri, itu hak dari pada terdakwa setelah surat dakwaan dibacakan. Meski demikian,

penuntut umum tentu menanggapi sesuai yang dijadwalkan pada 21 Mei 2025.

"Jadi memang itu hal biasa saja. Memang dalam KUHP itu diatur. Itu merupakan hak dari terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan yang telah kami berikan, dan kami bacakan di depan persidangan," paparnya.

Mengenai dengan keterangan terdakwa Andi Ibrahim beralih tidak mengetahui bahwa itu uang palsu, Basri menyatakan, terkait keterangan saksi dari terdakwa Mubin, sesuai sidang tadi, disampaikan layak beda dan sebelum diberikan dalam bentuk ultra violet.

"Ini mengindikasikan bahwa sebenarnya rupiah yang diberikan kepada saudara Mubin indikasinya bahwa tidak asli, atau palsu. Kalau terkait nanti perkembangan persidangan, majelis hakim akan memberikan kelepaan kepada teman-teman media untuk mengambil gambar (upal)," tuturnya. <sup>(ant)</sup>

# SHARP

Be Original.

## PINTAR PAKAI SHARP

(Pasti hoki peNuh cinTA Ramadhan)

PROMO JANUARI - MARET 2025

### PROMO CASHBACK

MESIN CUCI MEGAMOUTH	: 100RB
MESIN CUCI FRONT LOADING & DRYER	: 200RB
KULKAS 2 PINTU SJ-316 HINGGA SJ-326	: 50RB
SJ-426 HINGGA SJ-456	: 100RB
KULKAS SBS & BABY QUEEN	: 150RB
KULKAS VETRO	: 200RB
AC STANDARD 0.5 - 1 PK	: 100RB
AC ALL TYPE 1.5 PK	: 200RB
AC ALL TYPE 2 PK	: 300RB



DAPATKAN PROMO MENARIK DIATAS HANYA DI TOKO ELEKTRONIK KESAYANGAN ANDA

Download Aplikasi: **SHARP ID**

sharpindonesia

Syarat & ketentuan berlaku

Google Play

App Store

www.id.sharp



UNTUK INFORMASI DAN LAYANAN SHARP TERBARU HUBUNGI:

0-800-1-225588

0811-820-5666



Layanan di kantor Bank Mandiri. FOTO: IST.

# Portofolio Bank Mandiri Naik Inklusi Keuangan Meluas

Palu, Metrosulawesi - Bank Mandiri terus memperkuat komitmennya dalam mendukung agenda keberlanjutan nasional. Melalui strategi terintegrasi yang berlandaskan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam tiga pilar utama yakni Sustainable Banking, Sustainable Operation, dan Sustainability Beyond Banking.

Bank Mandiri terus membuktikan peran strategisnya dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. Pada pilar Sustainable Banking, Bank Mandiri mencatatkan total portofolio berkelanjutan sebesar Rp294 triliun per Maret 2025 atau tumbuh 11% secara tahunan.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan portofolio hijau sebesar 13,4% hingga mencapai Rp148 triliun, yang sekaligus mengukuhkan posisi Bank Mandiri sebagai green market leader di Indonesia dengan pangsa pasar lebih dari 35%.

Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan bahwa pertumbuhan portofolio ini turut merepresentasikan akselerasi perluasan akses terhadap keuangan yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran Bank Mandiri dalam mendorong investasi hijau yang menjangkau berbagai

lapisan masyarakat dan berbagai sektor usaha.

"Bank Mandiri juga secara aktif membangun hubungan masyarakat yang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, pemerintah, dan pelaku industri energi," ujarnya Darmawan, Rabu, 14 Mei 2025.

Secara internal, Bank Mandiri telah membangun pilar dan strategi berkelanjutan yang solid dalam implementasi prinsip-prinsip ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola). Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan melalui peluncuran berbagai inisiatif strategis dan integrasi prinsip ESG ke dalam core business Bank Mandiri.

"Ke depan, kami juga akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar dapat memberikan nilai tambah kepada ekonomi Indonesia," katanya.

Hal ini, lanjut Darmawan, menjadi kunci keberhasilan perusahaan dalam menangkap peluang transisi energi, termasuk kesiapan pencapaian target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2030 dan mendukung proyek-proyek sesuai target Enhanced NDC (ENDC).

"Dengan kekuatan finansial, manajemen risiko, dan model bisnis berkelanjutan, perusahaan optimis membangun sinergi kemitraan strategis yang menjadi kunci sukses ke depan," jelasnya.

Kemudian pada pilar Sustainable Operation, Bank Mandiri terus menjalankan berbagai carbon neutral initiatives melalui operasional yang ramah lingkungan, seperti green building, penggunaan kendaraan listrik dan hybrid, serta pemanfaatan energi surya seluruhnya dipantau secara berkala melalui platform Digital Carbon Tracking yang telah dikembangkan.

"Sebagai hasil dari upaya tersebut, hingga akhir tahun 2024, Bank Mandiri berhasil mengurangi emisi sebesar 33% dibandingkan dengan baseline tahun 2019," terangnya.

Darisi tata kelola, Bank Mandiri telah membentuk struktur tata kelola yang komprehensif yang mencakup Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite ESG untuk memastikan pengawasan yang efektif dan arah strategis dalam penerapan ESG. Bank Mandiri juga menunjukkan performa unggul dengan meraih predikat sebagai salah satu top performers pada Corporate Governance Perception Index (CGPI) dengan skor 95,30. (fkk)

# Kementerian UMKM Minta Lokapasas Lindungi Produk Lokal Indonesia

Padang, Metrosulawesi- Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meminta berbagai platform marketplace atau lokapasas memberikan perlindungan produk lokal di tengah gempuran barang-barang luar negeri yang menyerbu Indonesia.

"Kementerian UMKM sudah meminta kepada lokapasas agar ada upayalah sedikit melindungi produk-produk dalam negeri," kata Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza di Padang, Sumatera Barat, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Wamen UMKM saat membuka kegiatan entrepreneur hub terpadu yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand) di Padang, Sumatera Barat.

Menurut Wamen, dampak perang dagang antara China dan Amerika Serikat perlu disiasati terutama bagaimana

melindungi produk-produk dalam negeri. Sebab, jika hal itu tidak diantisipasi maka bisa membawa dampak bagi pelaku UMKM di tanah air.

Meskipun Kementerian UMKM tidak dalam posisi untuk menganalisis tarif perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, namun Helvi menegaskan berkewajiban untuk melindungi dampaknya terhadap UMKM lokal.

Perlindungan tersebut di antaranya dengan memberikan pelatihan, penguatan permodalan hingga membantu membuka perluasan pasar UMKM hingga ke luar negeri. Hal itu sesuai arahan dan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto.

Menyikapi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, Wamen UMKM berharap kepala negara atau kementerian pengambil kebijakan

bisa memberikan solusi atau kebijakan yang lebih spesifik agar produk lokal tidak terlalu terdampak atas pemberlakuan tarif resiprosal.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) RI Budi Santoso saat melakukan kunjungan kerja ke Padang (9/5) mengatakan Indonesia terus membidik pasar ekspor baru untuk menyiasati dampak perang dagang antara Amerika Serikat dengan China yang terus meningkat.

Pada 2026, ujar dia, Indonesia memiliki target ekspor hingga 7,1 persen dan hal itu akan melibatkan berbagai sektor UMKM.

Ia menyakini berbagai macam produk UMKM Indonesia bisa bersaing di tataran internasional. Hanya saja tetap butuh peningkatan kualitas dan tata cara pemasaran agar bisa menembus pasar global. (ant)





Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) terkait legalisasi Koperasi Desa Merah Putih di Jakarta, Rabu (14/5/2025). FOTO ANTARA/HO-KEMENKOP

# Menkop Jamin Kemudahan Legalisasi Kopdes Merah Putih

Jakarta, **MetroSulawesi**-Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menjamin proses legalisasi Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi lebih mudah dan dipercepat setelah adanya perjanjian kerjasama yang telah dijalin antara Kementerian Koperasi dan Kementerian Hukum.

Kerjasama tersebut ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Rabu. MoU tersebut bertujuan mempermudah dan mempercepat realisasi pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih.

"Melalui MoU ini, saya optimistis dan yakin bahwa proses legalitas pembentukan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih bisa lebih dipercepat lagi," ujar Budi Arie usai acara penandatanganan, dikutip dari keterangan pers Kemenkop.

Acara tersebut juga melibatkan penandatanganan nota kesepahaman

antara Kemenhum dengan 20 kementerian/lembaga lainnya.

Lebih lanjut, Budi Arie meyakini bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih di tingkat desa akan lebih akuntabel, transparan, dan kredibel berkat penguatan payung hukum dan rambu-rambu yang disiapkan.

"Kita perkuat payung-payung hukum beserta rambu-rambu agar Kopdes Merah Putih berjalan di atas jalan yang benar," tegasnya.

Ia menekankan bahwa kerjasama ini akan melindungi program Kopdes Merah Putih secara hukum dan meminimalisir potensi penyimpangan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk memperkuat kolaborasi dalam menjalankan seluruh programnya,

terutama menyangkut peraturan perundangan, demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kemenkop mendapat tugas menyiapkan 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih yang harus didaftarkan legalitasnya. Itu bukan pekerjaan biasa," kata Supratman.

Ia mengungkapkan bahwa Kemenhum telah mengembangkan inovasi digital untuk mendukung program ini.

Ia menyebut sebuah jalur khusus telah disiapkan untuk pendaftaran legalitas Kopdes Merah Putih, yang memungkinkan pendaftaran hingga 1.000 koperasi secara bersamaan dalam waktu satu jam. Inovasi ini diharapkan dapat mempercepat proses legalisasi dan mendukung terwujudnya target pembentukan Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.<sup>(ant)</sup>



Kepala Inspektorat Donggala, Hasan secara simbolis menerima laporan Desa Marana Foto Tamsyir

## ADB Demo di Inspektorat dan Kejari, Terkait Kasus Korupsi

**Donggala. Metrosulawesi-** Aliansi Donggala Bergerak (ADB) memenuhi janjinya melakukan aksi demo dengan tuntutan penuntasan kasus korupsi.

Aksi yang dipimpin Heri Souemna dan Ahmad Muhsin, Rabu 14 Mei 2025 itu mengambil titik orasi pertama kantor Inspektorat Donggala.

“Kami mendesak inspektorat mengeluarkan hasil audit kerugian negara desa Marana, mendesak bupati Donggala segera membayarkan sisa tunggkan kepada perangkat desa Rp1,3 miliar lebih berdasarkan putusan PTUN Palu.

Tak butuh waktu lama massa aksi melakukan orasi, Kepala Inspektorat Hasan Nurdin tanpa diminta langsung mendatangi dan berbaur dengan pendemo di jalan.

“Saya menghargai penyampaian aspirasi warga Desa Marana, makanya saya harus turun bergabung bersama, karena sebelum jadi PNS, pernah juga jadi pendemo” kata Hasan.

“Menyangkut tuntutan warga desa Marana akan saya lanjutkan atau kordinasikan kepada Bupati, utamanya menyangkut putusan PTUN Palu pembayaran sisa uang perangkat desa Marana Rp1,3 miliar lebih,” bebarnya.

“Kasus Plt Kades Marana Serlin tidak lama lagi akan kami serahkan hasil investigasi ke Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Tompe. Kalau rabat beton desa Mbulawa Rp10 miliar, saya no komen. Karena kasusnya sudah diambil alih APH. Kami di APIP tidak bisa masuk lagi mencampuri,” tukasnya.

Ditambahkannya menyangkut temuan BPK, pihaknya sudah tindaklanjuti hasil temuan tersebut.

“Temua BPK itu sifatnya ada dua, pertama admistrasi dan kedua temuan sifatnya finansial, dan keduanya sudah kami lakukan untk tahun 2024 kemarin progresnya mencapai 70% lebih,” pungkasnya.

Setelah menerima penjelasan dari kepala Inspektorat, massa aksi kemudian melanjutkan orasi di kantor Kejari Donggala.

“Kami meminta kejari Donggala menuntaskan perkara dugaan korupsi yang saat ini sedang dilakukan, tuntaskan kasus POPDA, Replanting, Kasus Dana Hibah KPU Donggala dan kasus rabat Beton desa Mbulawa Rp10 miliar,” teriak Heri Soumena. (anc)



Bupati pimpin pertemuan bahas pembangunan Intake oleh PT BTIIG, Rabu 14 Mei 2025.

## Bupati Morowali Tolak Pembangunan Intake di Sungai Karaupa

Morowali, Metrosulawesi- Pemerintah Kabupaten Morowali melakukan pertemuan membahas pembangunan intake air baku industri PT Baoshuo Taman Industri Investmen Group (BTIIG), yang sebelum ini diprotes oleh Gerakan Petani Indonesia Menggugat (Gapit).

Pertemuan dipimpin langsung Bupati Morowali yang didampingi sejumlah pejabat pemerintah Morowali. Hadir, perwakilan manajemen PT BTIIG dan massa Gapit atau gabungan masyarakat yang berasal dari Kecamatan Witaponda, Bumi Raya, dan Bungku Barat.

Dalam arahannya, Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, menyampaikan bahwa keberadaan air sungai Karaupa merupakan sumber kehidupan bagi para petani di Kecamatan Bungku Barat, Bumi Raya, dan Witaponda.

"Bupati Morowali dan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten, menolak pembangunan intake," ucap Iksan saat pertemuan tersebut, di Kantor Bupati Morowali, Rabu, 14 Mei 2025.

Bupati kembali mengingatkan bahwa pertanian tidak boleh diganggu oleh kepentingan perusahaan, sebab Tiga wilayah kecamatan

ini sebagai lumbung pangan yang ada di Morowali.

"Air adalah sumber kehidupan untuk keberlangsungan persawahan dan petani," ucap Bupati.

Bupati juga menekankan bahwa pentingnya etika dan komunikasi sebelum investasi dilakukan, dan perusahaan jangan semata mengejar keuntungan tanpa memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat.

"Prinsip kami, investasi tidak pernah ditolak. Sebaliknya, investasi jangan mengabaikan kepentingan Petani, ikutilah prosedur dan hormati etika yang ada," urianya. <sup>(rad)</sup>



Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid saat memberikan sambutan saat menerima kunjungan perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, di rumah jabatan Wali Kota. (FOTO: HUMASPEMKOT)

# Pemkot Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

**Palu, Metrosulawesi-** Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, SE didampingi oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P menerima kunjungan dari Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 14 Mei 2025, di rumah jabatan Wali Kota.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Palu yang telah disampaikan sebelumnya.

Dalam sambutannya, Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan momentum yang

sangat penting bagi Pemerintah Kota Palu, khususnya dalam rangka mendapatkan arahan dan catatan strategis atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK.

"Pertemuan ini menjadi sangat penting bagi kami, khususnya untuk mendapatkan arahan terkait dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, agar dapat ditindaklanjuti secara serius oleh jajaran Pemerintah Kota Palu," ujar Wali Kota.

Wali Kota Palu juga menyampaikan apresiasi atas perhatian, bimbingan, dan arahan yang telah diberikan oleh BPK Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka memperkuat tata kelola keuan-

gan daerah yang transparan dan akuntabel.

"Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta bimbingan yang sangat produktif dari BPK. Ini menjadi penguatan dalam pengawasan dan pengawalan yang dilakukan terhadap Pemerintah Kota Palu dalam mengelola keuangan daerah secara lebih baik," tambah Wali Kota Palu.

Pemerintah Kota Palu berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi yang diberikan, guna terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik secara umum. <sup>(bj)</sup>



Penggemar NDX A.K.A memadati Lapangan Imanuel Palu, Senin, 12 Mei 2025 FOTO:IST

# Ribuan Penggemar NDX Tumplek di Lapangan Immanuel

**Palu, Metrosulawesi** - Ribuan penggemar group band NDX A.K.A rela berdesak-desakan di Lapangan Imanuel Palu, Senin, 12 Mei 2025. Tampak kaum hawa juga tumplek menyaksikan penampilan group musik hip-hop asal Bantul itu.

"Saya sudah lama menjadi penggemar NDX," ucap Sinthia, salah satu penggemar NDX.

NDX dihadirkan dalam penutupan Semarak Sulteng Nambaso 2025, yang diundang Pemprov Sulawesi Tengah di tengah pemberlakuan efisiensi anggaran.

Dalam kesempatan ini, Guber-

nur Sulteng, Anwar Hafid, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya rangkaian kegiatan selama hampir satu bulan penuh.

"Semarak Sulteng Nambaso bukan sekadar perayaan. Ini adalah upaya membangkitkan kembali kecintaan kita terhadap tanah kelahiran, Sulawesi Tengah yang kita cintai bersama," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa antusiasme masyarakat sangat luar biasa, terutama dalam kunjungan ke Mall Pelayanan Publik di Jojokodi Convention Center (JCC), yang menjadi pusat kegiatan pelayanan selama acara berlangsung.

Gubernur mengapresiasi kerja keras panitia, stakeholder, dan seluruh masyarakat yang telah ikut berperan dalam menyukseskan kegiatan ini meski di tengah keterbatasan anggaran.

"Dalam kondisi efisiensi anggaran, panitia tetap mampu memberikan yang terbaik. Ini adalah bentuk cinta dan dedikasi kita kepada masyarakat," ungkap Anwar.

Dia menyampaikan harapan dan permohonan dukungan dari masyarakat Sulawesi Tengah untuk masa kepemimpinannya menahkodai Provinsi Sulawesi Tengah. (mic)



Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Palu, Herdi. FOTO: MICHAEL

# Basir Cyio Wajib Lapor Selama Setahun

**Palu, Metrosulawesi** - Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Palu, Herdi, mengungkapkan Muh Basir Cyio, mantan Rektor Untad, telah menjadi klien Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palu sejak pekan lalu.

"Setelah kami cek dokumennya, pak Basir mendapatkan hak PB (pembebasan bersyarat)," ungkap Herdi di kantornya, Rabu, 14 Mei 2025.

PB merupakan hak yang diberikan kepada warga binaan untuk dibebaskan sebelum masa pidananya habis dengan syarat telah menjalani 2/3 masa pidana dan persyaratan lainnya.

Pembebasan ini memungkinkan

narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Herdi mengatakan selanjutnya pembinaan Basir Cyio menjadi tanggung jawab Bapas Palu. Secara teknis, Staf Pelayanan Tahanan Rutan Palu, Fahmi, menerangkan Basir Cyio akan menjalani wajib lapor selama setahun.

"Satu tahun menjalani wajib lapor ke Bapas Palu," terangnya.

Disebut, Basir Cyio mendapat hak PB untuk kasus Tipikor dan UU ITE. Untuk masing-masing kasus ini Basir telah membayar subsider sehingga tidak perlu lagi menjalani tambahan hukuman.

"Kasus Tipikor pembayaran subsidiernya Rp50 juta. Kasus UU ITE juga subsidiernya Rp50 juta. Jadi totalnya pak Basir membayar Rp100 juta," ucap Fahmi.

Fahmi menambahkan Basir menghirup udara segar mulai Rabu, 7 Mei 2025. Sebelumnya diberitakan, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Palu, Herdi, membenarkan Basir Cyio telah bebas sejak pekan lalu. Mantan Ketua Senat Untad itu disebut bebas dengan status CB (cuti bersyarat).

"Meski bebas, pak Basir memiliki kewajiban untuk lapor secara rutin ke Balai Pemasyarakatan (Bapas)," ungkap Herdi kepada Metrosulawesi, Selasa, 13 Mei 2025. <sup>(mic)</sup>



Rakhmat Renaldy saat Coffee Morning bersama jajaran di Palu, baru-baru ini. FOTO: IST

# Dorong Jaminan Fidusia Wajib Didaftarkan

**Palu, Metrosulawesi** – Ketimpangan antara jumlah perjanjian pokok yang dibuat oleh perusahaan pembiayaan dengan akta jaminan fidusia yang tercatat di Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah (Kanwil Kemenkum Sulteng).

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menegaskan pentingnya penegakan prinsip legalitas dalam pendaftaran jaminan fidusia, karena tanpa pendaftaran resmi, hak-hak hukum kreditur atas jaminan menjadi lemah.

“Kami akan dorong agar setiap perjanjian pokok yang memuat jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ini bukan hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga perlindungan

bagi semua pihak yang terlibat,” ujar Rakhmat saat Coffee Morning di Palu, baru-baru ini.

Sebagai bentuk langkah konkret, Kanwil Kemenkum Sulteng dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) Sulawesi Tengah sepakat untuk memperketat mekanisme penerbitan akta notaris. Salah satunya melalui kebijakan yang akan menolak pendaftaran fidusia jika pengajuan dilakukan lebih dari 30 hari setelah perjanjian pokok dibuat.

Selain itu, kata Rakhmat Renaldy, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Ditjen AHU guna memastikan sinkronisasi data antara akta notaris dan input sistem AHU.

Isu strategis kedua yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembenu-

kan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan keterbatasan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK), terutama karena cakupan wilayah kerja yang luas.

“Percepatan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Kami butuh peran aktif notaris untuk memastikan proses legalitas koperasi bisa dipenuhi dengan cepat dan benar,” tegas Rakhmat Renaldy.

Ia pun menyampaikan bahwa kegiatan ini akan dijadikan forum berkelanjutan yang melibatkan lebih banyak mitra strategis ke depan.

“Kami berharap forum seperti ini menjadi ruang koordinasi yang produktif untuk membangun layanan hukum yang berkualitas dan akuntabel di Sulawesi Tengah,” tuturnya. <sup>(mic)</sup>



Mardiani Mangun dan Olkamen memperagakan teknik yoga kepada mahasiswa program Studi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Palu di Ruang serba guna Kampus Poltekkes Kemenkes Palu Jurusan Kesehatan Lingkungan, Mamboro, Rabu 14 Mei 2025. FOTO: FAISAL

# 54 Mahasiswa Poltekkes Berlatih Yoga Prenatal

**Palu, Metrosulawesi-** Poltekkes Kemenkes Palu Jurusan Kebidanan Program Studi Sarjana Terapan (Prodi Sarter) gelar program unggulan bertajuk Intervensi

Holistik Berbasis Yoga dalam Asuhan Kebidanan di ruang serba guna Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Palu, jalan Thalua Konci Mamboro, Palu. (14/05).

Ketua Program Studi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Palu, Siti Hadijah Batjo, SSiT, MPH., menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pendekatan holistik dalam pelayanan kebidanan. "Melalui praktik yoga yang terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan kesejahteraan ibu hamil, mengurangi kecemasan, serta mempersiapkan ibu secara fisik dan mental menjelang persalinan, kami ingin mahasiswa mampu mengintegrasikan pendekatan ini dalam praktik mereka," ujarnya.

Hadijah menambahkan bahwa asuhan holistik berbasis yoga dalam

pelayanan kebidanan terbukti dapat meningkatkan kebugaran serta menurunkan risiko penyakit jantung pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas.

Sementara itu Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palu, Hastuti Usman, SST. M.Keb., mengungkapkan kegiatan ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan tentang pentingnya prenatal yoga, baik dari sisi kesehatan fisik maupun mental selama masa kehamilan.

"Melalui pelatihan ini, mahasiswa mampu memberikan informasi kepada ibu hamil keterampilan praktis seperti teknik pernapasan, relaksasi, dan gerakan yoga yang aman, dan memberdayakan ibu hamil agar lebih percaya diri dalam menjaga kesehatannya dan mempersiapkan persalinan dengan lebih tenang dan nyaman," lanjutnya.

Selain itu, kata dia kegiatan ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa kebi-

danan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik langsung di masyarakat. "Ini merupakan bentuk kontribusi nyata dalam promosi kesehatan ibu dan anak serta upaya menjalin hubungan baik antara calon tenaga kesehatan dan masyarakat," pungkasnya.

Dua dosen Poltekkes Kemenkes Palu, Mardiani Mangun, S.SiT, MPH dan Olkamen J. Longulo, S.Kep., Ns., M. Sc, yang ditunjuk panitia memberikan materi Prenatal Yoga kepada 54 mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan secara bersamaan.

Mengawali sesi, Mardiani menyampaikan apresiasi atas semangat para mahasiswa. "Assalamu'alaikum dan selamat pagi sungguh luar biasa melihat antusiasme kalian mengikuti sesi ini PKKB hari ini," ujarnya. Mantan Ketua IBI Sulteng ini memperkenalkan prenatal yoga sebagai metode yang efektif untuk menjaga kesehatan ibu hamil, terutama saat menghadapi tekanan dalam situasi darurat.<sup>(tha)</sup>



Warga binaan pemasyarakatan dirujuk ke RSUD Undata Palu, Selasa, 13 April 2025. FOTO: IST

# Warga Binaan Dirujuk ke RS Undata

**Palu, Metrosulawesi** - Sejumlah warga binaan pemasyarakatan dirujuk ke RSUD Undata Palu, Selasa, 13 April 2025. Warga binaan dirujuk oleh Lembaga Pemasyarakatan Palu.

Rujukan dilakukan setelah sejumlah WBP menjalani kontrol kesehatan lanjutan yang dilaksanakan oleh petugas medis Lapas Palu. Dari hasil pemeriksaan, beberapa WBP dirujuk ke Rumah Sakit Undata Palu guna mendapatkan penanganan medis yang lebih intensif sesuai kebutuhan kesehatan.

Kepala Lapas Palu, Makmur, menyampaikan langkah ini mer-

upakan bagian dari komitmen pihaknya untuk menjamin hak-hak kesehatan para WBP sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

"Setiap WBP berhak mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Kami terus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk RS Undata dan Puskesmas Birobuli, agar layanan kesehatan di Lapas Palu semakin optimal," ujar Kalapas.

Disebut, Puskesmas Birobuli juga terus berperan aktif dalam pengawasan dan pemantauan kesehatan para WBP. Tim medis dari puskesmas secara berkala melakukan

kunjungan dan pemeriksaan guna memastikan kondisi kesehatan para penghuni lapas tetap terjaga.

Kerja sama lintas sektor ini diharapkan mampu mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan manusiawi, serta mendorong proses rehabilitasi yang lebih efektif bagi para WBP.

"Ini semua sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Palu. Kami terus melakukan langkah proaktif melalui pemeriksaan rutin dan rujukan medis ke rumah sakit," pungkas Makmur. <sup>(mic)</sup>



Kepala Sentra Nipotowe Palu Diah Rini Lesmawati (kanan) saat berkunjung ke Sentra Handayani dan Mulya Jaya di Jakarta. ANTARA/HO-SENTRA NIPOTOWE PALU

# Balai Nipotowe Kembangkan Sistem Rujukan Terintegrasi

**Palu, Metrosulawesi-** Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual (BRSPDI) Nipotowe Kota Palu, Sulawesi Tengah, menggandeng Sentra Handayani dan Mulya Jaya di Jakarta untuk mengembangkan sistem rujukan terintegrasi guna penerima manfaat dalam membutuhkan layanan kesehatan di luar daerah.

Kepala Sentra Nipotowe Palu Diah Rini Lesmawati mengatakan pihaknya melakukan koordinasi dengan dua sentra lainnya dalam pengembangan sistem rujukan dalam layanan kesehatan lanjutan di luar Sulawesi Tengah.

"Langkah ini kami ambil sebagai respons atas keterbatasan penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan mengalami penyakit tertentu yang membutuhkan penanganan

segera di luar daerah," kata Diah melalui keterangan tertulisnya diterima di Palu, Rabu.

Ia mengemukakan ke depan dengan sistem rujukan terintegrasi itu dapat mempermudah akses layanan dan meningkatkan efisiensi.

"Kami ingin memastikan melalui kerja sama ini bisa memberikan pemenuhan kebutuhan dasar para penerima manfaat selama menjalani pengobatan di luar daerah seperti di Jakarta," ucapnya.

Ia menuturkan bahwa Sentra Handayani dan Sentra Mulya Jaya bersedia dan memberikan dukungannya untuk menyediakan fasilitas permakanan, asrama, kebersihan diri, serta layanan antar-jemput ke rumah sakit.

"Untuk biaya tambahan di luar tanggungan Sentra Nipotowe tetapi

tetap menjadi tanggung jawab lembaga perujuk," sebutnya.

Menurut dia, pentingnya komunikasi antara lembaga perujuk, keluarga penerima manfaat dan sentra tujuan.

"Tentunya semua harus dipersiapkan termasuk dokumen BPJS dan penjadwalan rumah sakit," katanya.

Ia berharap nantinya kolaborasi dan kerja sama dengan sentra lainnya dapat menjadi solusi dalam menghadirkan layanan komprehensif.

"Harapannya melalui kolaborasi lintas sentra ini bisa menjadi solusi konkret dalam menghadirkan layanan komprehensif terutama layanan kesehatan yang terintegrasi bagi penerima manfaat khususnya mereka yang berasal dari keluarga miskin," ujarnya.

(ant)



Kepala Bapplitbangda Parigi Moutong Irwan FOTO ANTARA/MOH RIDWAN

# Prioritaskan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

**Parigi, Metrosulawesi-** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng) tetap memprioritaskan penanggulangan kemiskinan ekstrem lewat intervensi berbagai program kolaborasi.

"Kemiskinan salah satu isu yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah (pemda), oleh sebab itu penanganannya dilakukan secara kolaborasi melalui lintas sektor," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Parigi Moutong Irwan, Rabu (14/5/2025).

Ia menjelaskan tiga tahun terakhir angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan cukup signifikan, dari 6,2 persen menjadi 1,3 persen pada

tahun 2024.

Intervensi penanggulangan tersebut, salah satunya melalui program gerakan cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Program itu salah satu yang memberikan andil terhadap penurunan angka kemiskinan ekstrem pada 2024, dengan anggaran hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng sebesar Rp8 miliar.

"Dari program gerakan cepat pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, sekitar 813 kepala keluarga (KK) diintervensi," ujarnya.

Ia mengemukakan 813 KK penerima manfaat program tersebut tersebar di lima kecamatan, yakni Palasa, Tinombo, Tinombo Selatan, Sidoan, dan Tomini.

Kemudian, upaya lain yang dilakukan, yakni membuka akses jalan di wilayah pemukiman masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang berada di pegunungan sebagai langkah menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

"Akses jalan penting, supaya masyarakat KAT mudah menjual hasil produksi sekaligus menekan biaya transportasi," ucap Irwan.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan secara umum di Parigi Moutong lima tahun terakhir secara bertahap mengalami penurunan dari angka 17 persen pada tahun 2020, kemudian tahun 2023 turun ke angka 14,6 persen, 2024 turun 14,2 persen. <sup>(ant)</sup>

# DPRD Imbau Pemda Lebih Selektif Gunakan Anggaran



Ketua DPRD Poso Samuel Munda FOTO:IST

**Poso, Metrosulawesi-** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso, mengimbau kepada Pemerintah Kabupaten Poso untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran, atau melakukan pemilahan anggaran yang disesuaikan dengan keuangan yang terse-

dia.

"Penyesuaian program kerja terkait pemangkasan anggaran yang cukup besar pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini mengharuskan ada rencana pembangunan dan realisasi yang ditunda pelaksanaannya, namun secara

keseluruhan tetap mengacu pada kebijakan dan prioritas dan plafon anggaran APBD 2025," tegas Samuel Munda, S.E., Ketua DPRD Poso, kepada Metrosulawesi, Rabu (14/5).

Samuel mengimbau, agar Pemerintah Daerah untuk dapat terus mencari terobosan - terobosan baru dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam hal Kualitas Pengelolaan Keuangan yang baik, baik dari segi Pelaksanaan Kegiatan dan Akuntabilitas Laporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

"Selaku abdi masyarakat, tentunya kita harus mencari solusi terbaik, baik berupa upaya mencari terobosan baru dalam peningkatan PAD, serta dalam hal Kualitas Pengelolaan Keuangan yang baik dari segi pelaksanaan kegiatan dan akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku," tuturnya.

Pencapaian Ekonomi Makro lanjut Samuel, harus pula dibarengi dengan pencapaian Ekonomi Mikro, yang tentu akan menyentuh pada bagian terkecil, yakni masyarakat pelaku, diantaranya produsen dan konsumen.

"Tentu saja dalam hal ini pemerintah bukan hanya memikirkan atau mencari terobosan untuk penguatan ekonomi pemerintah, namun pula mencari terobosan baru agar daya beli serta kreativitas kekuatan perekonomian masyarakat juga meningkat pula," tegasnya. (pul)



Seksi Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Poso melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan kepada 70 Calon Pengantin (catin) bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Rabu (14/5). FOTO:IST

# 70 Orang Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan

**Poso, Metrosulawesi-** Seksi Binmas Islam Kementerian Agama Kabupaten Poso melaksanakan kegiatan Bimbingan Perkawinan kepada 70 Calon Pengantin (catin) bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Rabu (14/5).

Kepala Kemenag Poso H. Sutami.M.Idris. M.Pd.I menegaskan, Bimbingan Perkawinan (Bimwin) merupakan kegiatan dari Bimas Islam yang pelaksanaannya dapat dilakukan pada tiap-tiap KUA.

Kakan Kemenag Poso ini mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kebijakan dari pemerintah melalui Kankemenag sebagai tanggung jawab untuk memberikan ilmu, petunjuk serta bimbingan terbaik sebagai bekal kehidupan berumah

tangga bagi para Calon Pengantin (catin) dan upaya mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saat Catin mengarungi kehidupan berkeluarga.

“Keluarga yang damai itu tentu saja menjadi idaman. Semuanya pasti menginginkan rumah tangga yang tenang, damai harmonis keluarga saling mencintai menyayangi satu sama lain, bercita-cita bahagia kekal. Ini bisa terwujud, tidak sekedar niat saja, tapi harus dengan ilmu, mengerti caranya dan tahu ilmunya,” ungkapnya.

Untuk itulah kegiatan Bimwin ini sebagai salah satu cara untuk membekali Catin dengan ilmu dan pengetahuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran bagi

Catin dalam memahami tujuan membangun keluarga yang bahagia.

“Pasangan suami isteri dapat memahami hak dan kewajiban menuju keluarga sakinah, mampu mencapai cita-cita dalam kehidupan perkawinan, saling memahami satu sama lain,” tambahnya.

Mendampingi Kakan kemenag Poso H Sutami M. Idris dimana sekaligus membawakan materi diantaranya Kepala Seksi Bimas Islam Drs.H.Wawa Suryatna,M.HI, dari Dinas P2 KB Angelia Chintya Moula,AMd.Keb sebagai Nara sumber, juga hadir Kamad MAN 2 Poso, KUA Pamona Selatan serta peserta Calon Pengantin berjumlah 70 orang<sup>(pui)</sup>



Beberapa Armada Tangki milik PDAM Poso yang rusak berat dan sudah tidak berfungsi. FOTO: SAIPUL

# Miris, PDAM Poso Tidak Punya Ada Armada Tangki

Poso, **Metrosulawesi-** PDAM seringkali membutuhkan armada tangki, terutama saat terjadi gangguan suplai air, musim kemarau, atau saat ada kebutuhan khusus untuk penyediaan air bersih di daerah yang tidak terjangkau jaringan pipa. Armada tangki ini berfungsi untuk mendistribusikan air bersih dari sumber air PDAM ke lokasi yang membutuhkan.

Namun, bagi PDAM Poso yang sering terjadi kebocoran pipa hingga distribusi air bersih terhenti, sangat membutuhkan armada tangki yang memadai.

"PDAM Tirta Uemalino Poso hingga saat ini tidak ada armada

tangki, sebelumnya masih ada satu namun sudah rusak dan tidak bisa beroperasi, sehingga saat terjadi gangguan, suplai air yang seharusnya bisa teratasi dengan armada tangki, tidak bisa terlaksana," tegas Husai Kaluti, Direktur PDAM Tirta Uemalino Poso, kepada **Metrosulawesi**, Rabu (14/5).

Husai mengatakan, kalau persoalan armada tangki yang saat ini sangat dibutuhkan sudah disampaikan kepada DPRD Poso melalui Pansus PDAM Uemalino dan mereka siap untuk menindaklanjuti bersama Pemkab Poso nantinya.

Sementara itu, Ketua Pansus

PDAM Uemalino Poso Herlina Lawodi, ST saat dikonfirmasi menegaskan, dalam laporan Pansus telah mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, salah satunya pengadaan 2 unit armada tangki PDAM sebagai salah satu upaya untuk optimalisasi pelayanan air bersih khususnya dalam kota Poso dan Sekitarnya.

"Masalah ini juga sudah kami sampaikan kembali pada rapat Pansus LKPJ Bupati Poso saat pembahasan bersama Pemerintah Daerah pada beberapa hari yang lalu, saat itu kebetulan dihadiri juga oleh yang mewakili Direktur PDAM," tegasnya. (pu1)



Asesmen Sumatif Akhir Satuan Pendidikan (ASAP) tingkat SD adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran yang telah dipelajari siswa selama satu tahun ajaran. FOTO: IST

# Sebanyak 3.525 Siswa SD Ikuti Asesmen Sumatif Akhir

Poso, **Metrosulawesi**- Asesmen Sumatif Akhir Satuan Pendidikan (ASAP) tingkat SD adalah penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada semua mata pelajaran yang telah dipelajari siswa selama satu tahun ajaran.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso Dedriawan Talingkau, SSTP, kepada **Metrosulawesi**, Rabu (14/5) mengatakan, Asesmen Sumatif Akhir bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana siswa telah menguasai materi yang diajarkan selama tahun ajaran, dan digunakan sebagai dasar untuk me-

entukan kelulusan siswa.

Ia menjelaskan, saat ini seluruh siswa-siswi SD kelas VI baik negeri maupun swasta sedang melaksanakan Asesmen Sumatif Akhir. Para siswa terlihat sangat serius dalam mengerjakan soal. Hal ini tidak lain untuk melatih kesiapan para murid baik secara mental maupun pengalaman dalam mengerjakan soal.

"Kegiatan ini dilakukan serentak di Sekolah Dasar se-Kabupaten Poso yang diikuti sebanyak 3.525 siswa tersebar di 234 SD di Kabupaten Poso baik negeri maupun swasta. Sumatif Akhir Jenjang SD di Kabupaten Poso akan dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 19 Mei

2025," tutur Dedriawan Talingkau.

Dijelaskannya, penilaian Asesmen Sumatif Akhir merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan. Tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil belajar, penilaian juga menjadi sarana refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah berlangsung.

"Salah satu bentuk penilaian yang sangat krusial di Sekolah Dasar (SD) adalah penilaian sumatif akhir jenjang. Penilaian ini dilakukan pada akhir masa belajar siswa di kelas VI sebagai salah satu indikator untuk menentukan kelulusan dan kesiapan melanjutkan ke jenjang berikutnya " tuturnya. <sup>(pnl)</sup>



Kepala Dinas Cikasda Sulteng, Andi Ruly Djanggola, bersama jajaran memberi keterangan di Palu, Jumat, 9 Mei 2025. FOTO: MICHAEL

# Minta Inspektur Tambang Bertindak Tegas

**Palu, Metrosulawesi** - Sejumlah irigasi pertanian terancam akibat aktivitas penambangan ilegal di daerah ini. Salah satu yang sedang menjadi sorotan yaitu Bendung Irigasi Sungai Tada, Desa Silutung, Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Moutong.

Di sekitar bendung irigasi tersebut ada aktivitas penambangan pasir dan batuan. Padahal sudah terpampang larangan mengambil Batu Pasir dan Tanah pada lokasi kurang lebih 500 meter di hulu dan 1.000 meter di hilir bendung.

Kepala Dinas Cikasda Sulteng, Andi Ruly Djanggola, menyampaikan Bendung Irigasi yang dibangun

di Sungai Tada menggunakan uang negara senilai Rp8 Miliar. Oleh karena itu, ia menekankan, Inspektur Tambang Provinsi Sulteng harus memberhentikan kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di Bendung Irigasi Sungai Tada.

"Prinsipnya uang negara tidak boleh disia-siakan. Apalagi uang Negara sudah memperbaiki bendung itu dengan anggaran banyak, 8 Miliar rupiah," kata Ruly di Palu, Jumat, 9 Mei 2025.

Penambangan dipastikan Dinas ESDM Provinsi Sulteng ilegal karena belum memiliki izin. Oleh karena itu, ditegaskan harus ditindak

karena akan berdampak ke pertanian.

"Seharusnya Inspektur Tambang itu memberhentikan kegiatan penambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan di Bendung Irigasi Sungai Tada. Disitu sudah ada patok dimana dia menambang. Kalau di Patok 500 ke atas satu kilo ke bawah," tegas Ruly.

"Makanya Inspektur Tambang dalam hal ini harus menindaki karena kalau ada kerusakan di bendung Irigasi akan merugikan banyak orang. Memang ini harus sinergi oleh semua pihak, fungsi-fungsi Inspektur Tambang ini harus dilakukan," tandas Ruly. <sup>(mic)</sup>



Kepala DPMPPTSP Rifani Pakamundi. FOTO: MICHAEL

# DPMPPTSP Ajukan Pencabutan Izin Pengusahaan Air BTIIG

**Palu, Metrosulawesi** - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Provinsi Sulteng, Rifani Pakamundi, mengungkapkan pihaknya telah mengajukan pencabutan izin pengusahaan sumber daya air Sungai Karaupa oleh PT. Baoshuo Taman Industry Investment (BTIIG) Morowali.

Pengajuan ini sebagai sikap tegas atas penggunaan surat rekomendasi palsu dalam pengurusan izin pengusahaan air Sungai Karaupa di Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

"Terkait permasalahan tersebut, kami telah menyampaikan surat permohonan pencabutan izin PB-UMKU Pengusahaan Sumber Daya Air PT.BTIIG kepada Ke-

menterian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI," ungkap Rifani di kantornya, Rabu, 14 Mei 2025.

Ia menjelaskan pencabutan izin tidak bisa dilakukan secara online karena akun pengawasan OSS RBA Bidang Pengendalian belum tersedia menu pencabutan izin pada OSS-RBA.

"Sehingga kami perlu mengajukan permohonan pencabutan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi teknis (rekomtek) dari Dinas Cikasda Provinsi Sulteng," jelas mantan Pj Bupati Donggala itu.

Permohonan diajukan ke Menteri Investasi sejak 9 Mei 2025, dalam menindaklanjuti permintaan dari Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air (Kadis Cikasda)

Provinsi Sulawesi Tengah.

"Jadi yang kami ajukan pencabutan hanya untuk izin pengusahaan air Sungai Karaupa karena ini bermasalah. Ini perlu dipahami bersama agar jelas informasi kepada masyarakat," ujar Rifani.

Rifani menambahkan lolosnya rekomtek palsu karena pengajuan dari Dinas Cikasda melalui website Srikanda. Website ini dinilai rawan dibobol sehingga terjadi pemalsuan sebagaimana yang menjadi polemik saat ini.

"Kalau lewat OSS, ketat, tidak bisa dipalsukan. Masuk harus lewat akun, tidak bisa sembarang masuk. Pihak Cikasda tidak menggunakan akun, dia mengirim dokumen melalui web srikandi, sehingga gampang dibobol," pungkas Rifani. <sup>(mic)</sup>



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah mendesak Gubernur Sulteng mengeluarkan moratorium perusahaan yang masih bersengketa, Selasa, 13 Mei 2025. FOTO: IST

# Gubernur Didesak Moratorium Perusahaan Bersengketa

**Palu, Metrosulawesi** - Gubernur Sulawesi Tengah didesak untuk menerbitkan moratorium terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam sengketa atau konflik agraria dengan masyarakat. Desakan disampaikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah.

Kepala Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengaskan langkah ini merupakan bagian untuk menghentikan kriminalisasi warga dari kondisi belum jelasnya ijin pengelolaan lahan sambil menunggu verifikasi yang masih dilakukan oleh Satgas PKA bentukan Gubernur Sulteng.

"Kami mendorong pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Sulteng, untuk segera membuat

moratorium terhadap aktivitas di lahan-lahan yg masih bersengketa dengan masyarakat," ujar Livand dalam keterangannya yang diterima awak media, Selasa, 13 Mei 2025.

"Dengan kondisi ini baik pihak perusahaan maupun masyarakat harus bisa menahan diri, sampai kejelasan status lahan yang disengketakan/dikeluarkannya HGU diperjelas Satgas PKA," tambahnya.

Komnas HAM Sulteng juga mendorong pihak kepolisian melakukan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik secara adil dan berkeadaban melalui proses dialog atau mediasi yang bermartabat.

Pernyataan ini disampaikan setelah Komnas HAM menurunkan tim investigasi ke Kabupaten Morowali Utara guna menelusuri

konflik agraria antara perusahaan perkebunan sawit dengan warga di sekitar wilayah konsesinya.

"Kami berharap dengan moratorium tidak ada lagi warga yg dikriminalisasi," tegas Livand.

Dari hasil pemantauan awal, Komnas HAM mencatat adanya sembilan warga yang saat ini ditahan oleh Kepolisian Morowali Utara terkait perselisihan dengan pihak perusahaan.

"Kami menilai proses hukum yang berlangsung harus benar-benar memperhatikan aspek hak asasi manusia. Penahanan terhadap warga tidak boleh mengabaikan fakta bahwa konflik ini memiliki akar struktural (kebijakan pemerintah masalah lalu) yang kompleks," tegas Livand. <sup>(mic)</sup>



Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan bersama anak-anak PAUD di Kabupaten Parigi, Rabu (14/5/2025) FOTO MEDIA BERANI

# Ketua TP PKK Tekankan Pentingnya PAUD Holistik

**Parigi, Metrosulawesi-** Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tengah Sry Nirwanti Bahasoan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pendidikan inklusi sejak usia dini (PAUD).

Sry Nirwanti menekankan pentingnya penguatan pendidikan PAUD yang menyenangkan, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan anak-anak.

“PAUD bukan hanya tempat anak bermain, tetapi merupakan fondasi karakter dan kecerdasan anak bangsa. Maka penting bagi kita semua memastikan layanan PAUD berjalan secara holistik dan integratif,” kata Sry Nirwanti dalam kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (14/5/2025).

Kegiatan ini dihadiri Pejabat

Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo Djanggola serta jajaran pejabat daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Sry Nirwanti mengatakan, kualitas pembelajaran di PAUD harus ditunjang oleh guru-guru berkualitas, lingkungan belajar yang aman dan stimulatif, serta sinergi dengan orang tua dan masyarakat.

Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber nasional Dr. Diahrini Leswati, S.Pi., M.Si., yang memaparkan pentingnya pendekatan pendidikan inklusif dalam menciptakan ruang belajar yang ramah bagi seluruh anak, termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus.

Selain memberikan materi sosialisasi, kegiatan ini juga menjadi momentum konsolidasi para Bunda PAUD di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Parigi Moutong.

Sry Nirwanti mendorong agar setiap kecamatan segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD sebagai mitra utama dalam merancang dan mengawasi layanan pendidikan anak usia dini di wilayah masing-masing.

“Saya berharap peran Bunda PAUD tidak hanya simbolik, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak yang membangun sinergi lintas sektor demi mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa penguatan karakter anak sejak dini, transisi yang menyenangkan dari PAUD ke jenjang berikutnya, serta keterlibatan aktif orang tua dalam proses pengasuhan dan pendidikan adalah kunci keberhasilan generasi emas di masa depan.<sup>(ril/\*)</sup>



Petani menunjukkan cabai rawit yang baru saja dipanen di Desa Porame, Sigi, Sulawesi Tengah. FOTO ANTARA/BASRI MARZUKI

# Produksi Cabai Rawit per Mei Capai 5.326 Ton

**Palu, Metrosulawesi-** Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengatakan produksi komoditas cabai rawit di provinsi itu 5.326 ton sejak Januari hingga Mei 2025 atau dalam lima bulan terakhir.

"Lima bulan terahir produksi petani lokal sangat baik, dan ini memberikan dampak positif bagi petani setempat," kata Kepala Dinas TPH Sulteng Nelson Metubun di Palu, Sulteng, Rabu.

Ia menjelaskan dari produksi itu dapat diproyeksikan produksi tujuh bulan ke depan memberikan kontribusi yang baik kepada daerah.

Hasil produksi itu memberikan sur-

plus 2.399 ton dari konsumsi daerah 2.927 ton.

"Kami optimis dapat melampaui produksi cabai rawit pada 2024 sebanyak 16.201 ton dengan angka surplus 9.364 ton, karena petani lokal sangat konsisten menanam," ujarnya.

Ia mengemukakan, pemerintah daerah (pemda) gencar melakukan penguatan produksi kepada petani sejak beberapa tahun terakhir, karena cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang mempengaruhi inflasi.

Salah satu daerah di Sulteng gencar melakukan inovasi dalam pengendalian inflasi yakni Kota Palu melalui program Palu Mandiri Tangguh Pangan

melalui penanaman cabai dan Pemprov Sulteng membantu suplai bibit cabai rawit.

"Cabai salah satu komoditas yang digemari masyarakat Sulteng, sehingga komoditas ini memberikan pengaruh terhadap inflasi daerah," ucap Nelson.

Ia menambahkan selain cabai rawit, cabai besar juga memiliki produksi yang signifikan lima bulan terakhir sebanyak 3.114 ton dengan rata-rata konsumsi 949 ton.

"Cabai besar mengalami surplus 2.165 ton. Kami berharap konsistensi ini tetap terjaga supaya produksi melimpah sehingga pendapatan petani juga meningkat," katanya.<sup>(ant)</sup>



Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid (kedua dari kanan) memimpin rapat di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025). FOTO MEDIA BERANI

# RPJMD 2025-2030 Fokus pada Penuntasan Kemiskinan

**Palu, Metrosulawesi-** Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, menegaskan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 harus fokus pada penuntasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar-wilayah.

Ia meminta seluruh kepala OPD memahami betul substansi RPJMD dalam mengimplementasikan visi besar Sulteng Nambaso melalui sembilan program unggulan yang dikenal sebagai Sembilan Berani.

“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (14/5/2025).

Hadir dalam rapat ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan dan Kepala BPS Sulteng Simon Sapary. Turut mendampingi Wakil

Gubernur Reny Lamadjido.

Gubernur meminta Bappeda melakukan need assessment berbasis data DTKS untuk menyusun program pembangunan yang benar-benar tepat sasaran. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan data, lalu merasa paling tahu. Masyarakat harus ditanya apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujarnya.

Anwar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berencana membawa seluruh kepala dinas ke Buol pada 27 Mei mendatang untuk berdialog langsung dengan bupati dan OPD setempat.

“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani. Kita akan duduk tiga hari, bicara fokus. Dari situ, kita buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, gagal bersama,” katanya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur mencontohkan pendekatan sederhana namun berdampak dalam sektor pertanian. “Yang penting itu cuma dua, benih dan alat. Maka kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan siapkan brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” ujarnya.

Gubernur Anwar membagikan pengalamannya selama perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia mengaku mendapat banyak laporan dari pedagang kecil yang mengungkapkan dagangan mereka laris manis selama acara berlangsung.

Salah satu contoh keberhasilan lainnya adalah kehadiran Mall Pelayanan Publik selama perayaan HUT.

“Saya punya lembaga survei pribadi yang memantau secara berkala. Hasilnya, banyak warga yang ingin semua pelayanan disatukan dalam satu tempat,” tuturnya. (ril/\*)



Seluruh kepala desa di Kabupaten Sigi saat berada di kantor Bupati Sigi dalam kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. FOTO ANTARA/HO-PEMKAB SIGI

# Kejari Tangani Dugaan Korupsi DD Rarampadende

**Sigi, Metrosulawesi-** Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setempat memastikan dugaan penyalahgunaan dana desa di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat sudah ditangani inspektorat dan Kejaksaan Negeri Sigi.

"Untuk besaran temuan itu tidak ada di kami karena urusan pengawasan ada di inspektorat, sedangkan kami hanya bagian pembinaan kepala-kepala desa," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sigi,

Ambar, Rabu (14/5/2025).

Ia mengemukakan tugas PMD dalam desa untuk membantu bupati melaksanakan urusan terkait pemerintahan pada bidang pemberdayaan masyarakat.

"Jadi memang itu temuan inspektorat karena tugas utamanya adalah pengawasan dan audit penggunaan dana desa termasuk laporan penggunaannya dari desa langsung ke inspektorat," ucapnya.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi Andi Wulur mengatakan dugaan penyalahgunaan dana desa Rarampadende sudah diteruskan ke Kejaksaan

Negeri Sigi.

"Hasil temuan kami ada dugaan penyalahgunaan dana desa di Rarampadende mencapai Rp200 juta," sebutnya.

Menurut dia, hingga saat ini belum ada bukti pengembalian yang dilakukan pemerintah Desa Rarampadende terkait temuan tersebut.

"Kades Rarampadende sudah kami periksa dan proses penyelidikan sudah selesai," katanya.

Diketahui berdasarkan data Kementerian Keuangan bahwa dana desa 2025 untuk Kabupaten Sigi mencapai Rp147 miliar. <sup>(ant)</sup>



Pemerintah Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi menggelar Musyawarah Desa Khusus, dalam rangka pembentukan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih di Kantor Desa Kabobona, Rabu 14 Mei 2025. FOTO: ISTIMEWA

# Pemdes Kabobona Bentuk Koperasi Merah Putih

**Sigi, Metrosulawesi-** Pemerintah Desa Kabobona Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi menggelar Musyawarah Desa Khusus, dalam rangka pembentukan pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih di Kantor Desa Kabobona, Rabu 14 Mei 2025.

Kegiatan dihadiri Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Sigi, Desi Endrawati, Camat Dolo Muhammad Ali, Kades Kabobona Anwar, Ketua BPD, dan Pendamping Desa serta Masyarakat Desa Kabobona.

Kades Kabobona Anwar, menyampaikan pembentukan koperasi tersebut sesuai Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025.

Anwar mengatakan, bentuk dan jenis Koperasi Merah Putih Desa Kabobona berfokus di bidang pemodalan, sembako, perikanan dan peternakan, klinik desa, gerai desa serta usaha lainnya.

“Kami mengharapkan Koperasi Merah Putih Desa Kabobona dapat berjalan dengan lancar dan maju, yang pastinya untuk mense-

jahterakan masyarakat Desa kabobona” harapnya.

Camat Dolo, Muhammad Ali menyambut baik pembentukan Koperasi Merah Putih tersebut.

“Pembentukan Koperasi desa merah putih Desa Kabobona dilaksanakan melalui Musdesus sesuai dengan arahan pimpinan yaitu Bupati Sigi, mudah-mudahan kepengurusan koperasi Merah Putih di desa Kabobona ini dapat memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sigi,” sebutnya.

Ia menambahkan sesuai dengan harapan Presiden Prabowo tujuan utama Pembentukan koperasi desa merah putih untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

“Kami berharap kepada pengurus Koperasi yang terpilih nantinya, segera melaksanakan petunjuk teknis di perkoperasian, dan tentunya pengurus yang terpilih nanti dilaksanakan lagi pelatihan terkait pengetahuan tentang manajemen pengelolaan Koperasi, sehingga nantinya pengurus

yang terpilih sudah berkompeten dan profesional dalam mengelola koperasi Merah Putih tersebut,” imbuhnya.

Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UMKM Sigi, Desi Endrawati menyampaikan sangat mengapresiasi kepada Kades Kabobona, Camat Dolo yang langsung memfollowup hasil musyawarah tingkat kabupaten yang dilaksanakan beberapa pekan kemarin dikantor Bupati terkait koperasi Merah Putih.

Lebih lanjut ia juga mengatakan program ini merupakan program nasional dimana sesuai instruksi presiden diusahakan pada tanggal 12 Juni 2025 harus terbentuk 80 ribu koperasi di seluruh Indonesia secara nasional.

Harapannya semoga dengan langkah cepat yang dilakukan oleh pemerintah Sigi dalam mendukung program presiden ini dimana Sigi nantinya akan menjadi pilot project dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi Tengah pada khususnya,” ujarnya. <sup>(kno/\*)</sup>



Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya, Bhabinkamtibmas jajaran Polres Sigi intensif melaksanakan kegiatan sambang ke tempat-tempat usaha di desa binaannya. FOTO: IST

## Cegah Premanisme, Bhabinkamtibmas Sambangi Tempat Usaha

**Sigi, Metrosulawesi-** Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukumnya, Bhabinkamtibmas jajaran Polres Sigi intensif melaksanakan kegiatan sambang ke tempat-tempat usaha di desa binaannya.

Terpantau Bhabinkamtibmas Desa Kalukubula Polsek Biromaru Bripka I Ketut Mulyadana nampak mendatangi tempat-tempat usaha di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Selasa (14/5/2025) malam.

Kapolres Sigi melalui Kasihumas Iptu Nuim Hayat menyampaikan

para Bhabinkamtibmas jajaran Polres Sigi dalam setiap kunjungannya di desa binaan, selalu menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak masyarakat agar selalu waspada terhadap gangguan kamtibmas termasuk terhadap aksi-aksi premanisme.

"Para Bhabinkamtibmas mengajak warga untuk tidak ragu melapor jika melihat atau mengalami tindakan yang mengarah pada premanisme atau kejahatan lainnya. Karena keamanan lingkungan perlu dijaga bersama," ujar Iptu Nuim.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan sambang ini penting un-

tuk mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat serta mengetahui secara langsung situasi di lapangan.

"Dengan intens turun ke masyarakat, kami bisa lebih cepat mendeteksi potensi gangguan dan mencegah dini setiap gangguan kamtibmas, sehingga dapat menciptakan rasa aman di tengah warga," tambahnya.

Diharapkan, melalui kegiatan sambang seperti ini, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat dan lingkungan tetap dalam keadaan aman, nyaman dan kondusif<sup>(kno/\*)</sup>



Pelaku pencurian (jongkok) saat diamankan di Polres Touna, Selasa (13/5/2025). FOTO DOK POLRES TOUNA

## Polisi Bekuk Dua Pelaku Pencurian

**Touna, Metrosulawesi-** Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Tojo Una Una (Touna) berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam kasus pencurian berbeda di wilayah Ampana, Ibu Kota Kabupaten Tojo Una Una, pada Selasa (13/5/2025).

Penangkapan pertama dilakukan sekitar pukul 08.30 WITA terhadap seorang pria berinisial AN (28), warga Kelurahan Bailo Baru, Kecamatan Ampana Kota. Ia ditangkap atas dugaan pencurian handphone di kompleks Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ampana yang terjadi sekitar pukul 03.30 WITA dini hari.

Plt. Kasihumas Polres Touna, Iptu

Martono, mewakili Kasat Reskrim Iptu Syarif, A.Md.Kom., S.H., M.H., menjelaskan bahwa pelaku melakukan pencurian dengan modus pura-pura ingin membeli handphone.

AN memanggil korban untuk bertemu di RSUD Ampana, lalu meminta korban memperlihatkan handphone kepada "calon pembeli" yang disebut-sebut berada di lokasi. Namun setelah korban menyerahkan barang, pelaku justru melarikan diri.

"Tak butuh waktu lama, sekitar lima jam setelah kejadian, tim Resmob berhasil membekuk pelaku bersama dua orang temannya yang diduga terlibat, di Desa Buntongi, Kecamatan Ampana Kota," ungkap Iptu

Martono.

Barang bukti berhasil diamankan dan pelaku kini telah dibawa ke Mapolres Tojo Una Una untuk menjalani proses hukum.

Pada hari yang sama, sekitar pukul 19.00 WITA, tim Resmob kembali melakukan penangkapan terhadap pria berinisial AS (42), seorang tukang ojek bentor (becak motor) yang diduga mencuri emas milik penumpangnya pada bulan Agustus 2024 lalu.

"Pelaku mencuri emas yang berada dalam tas penumpang, yang tertinggal di atas bentor saat korban berbelanja di pasar sore. Setelah kejadian itu, pelaku melarikan diri ke Kabupaten Morowali," ujar Iptu Martono. (edy)

# Pemkab Tegaskan Komitmen Dukung Pengembangan Ponpes



Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli Moh Asrul Bantilan meletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Syafatul Quran Desa Tende. FOTO RRI

**Tolitoli, Metrosulawesi-** Pemerintah Kabupaten Tolitoli menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan keagamaan, khususnya melalui pembangunan dan penguatan pondok pesantren. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan dalam penyediaan bantuan infrastruktur demi menunjang kelangsungan kegiatan pendidikan yang berkesinambungan.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Tolitoli, Muhammad Asrul Bantilan, dikutip dari RRI, Rabu (14/5/2025).

Ia menyatakan bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang religius dan berakhlak mulia.

“Pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga menjadi panutan masyarakat da-

lam menjaga nilai-nilai moral dan spiritual,” ujar Asrul.

Ia menambahkan bahwa pembangunan dan penguatan pesantren sangat dibutuhkan, terlebih di tengah tantangan moral yang dihadapi generasi muda saat ini. Menurutnya, santri tidak hanya dibekali ilmu agama, tetapi juga dilatih untuk menjadi teladan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Keberadaan pesantren, lanjutnya, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, memberikan kontribusi besar dalam menangkal pergeseran nilai dan perilaku menyimpang. Karena itu, Pemkab Tolitoli terus mendorong pembangunan pondok pesantren di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.

“Pesantren memiliki fungsi penting dalam menjaga ketahanan moral bangsa. Dengan memperkuat peran pesantren, kita secara tidak langsung ikut memperkuat pondasi akhlak generasi penerus,” tegas Asrul.

Selain pembangunan fisik, Pemda Tolitoli juga tengah mengkaji bentuk dukungan lainnya. Di antaranya, pemberian insentif bagi tenaga pengajar, penyediaan fasilitas belajar, serta pelatihan peningkatan kapasitas bagi para pengelola pesantren.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Kabupaten Tolitoli dan menjadikan pondok pesantren sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, beriman, dan bertakwa.<sup>(ril/\*)</sup>